

ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI SYAHRIAH TERPADU DI PESANTREN DARUSSALAM BLOKAGUNG

Siti Aimah¹, Nur Khalimah²

e-mail: Sitiaimah1@iaida.ac.id¹, Nurkhalimah925@gmail.com²

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) implementasi manajemen pembiayaan Pendidikan melalui syahriah terpadu di Pesantren Darussalam Blokagung, 2) implikasi data manajemen pembiayaan Pendidikan melalui syahriah terpadu di Pesantren Darussalam Blokagung. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis interaktif tiga model yang memuat reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) implementasi manajemen pembiayaan pendidikan melalui syahriah terpadu yakni: a) musyawarah pengurus yayasan dan pengelola sistem, b) Perancangan Sistem Pembiayaan Pendidikan, c) penetapan nominal pembayaran, d) perekrutan tim pengelola system, e) penetapan tanggung jawab tim pengelola, f) pembinaan terhadap pengelola, g) menyiapkan aplikasi system pembayaran, h) membuat aplikasi SIS Darussalam, i) sosialisasi sistem *online* dan *offline*, j) rapat evaluasi system secara berkala, k) laporan rekap pembayaran. 2) implikasi manajemen pembiayaan pendidikan melalui syahriah terpadu yaitu: a) membentuk tim penanganan tunggakan pembayaran, b) menambah jalinan kerja sama perbankan, c) berupaya meningkatkan produktivitas kinerja pengelola, d) mencari solusi atas gangguan sistem *trouble* transaksi perbankan, e) memberikan sosialisasi dan pendampingan pada sebagian wali santri yang gagap teknologi (gaptek).

Kata Kunci : Manajemen, Pembiayaan Pendidikan, Syahriah Terpadu

Abstract

The aims of this study were to find out: 1) the implementation of education financing management through integrated sharia at the Darussalam Blokagung Islamic Boarding School, 2) the implications of education financing management data through integrated sharia at Darussalam Blokagung Islamic Boarding School. The type and research approach used is descriptive qualitative. The collection method used in this study is in-depth interviews, observation, documentation. Checking the validity of the data using triangulation. As for data analysis using interactive analysis of three models which include data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results of the study show that: 1) implementation of education financing management through integrated sharia are: a) deliberations of foundation administrators and system managers, b)

Analisis Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Syahriah Terpadu Di Pesantren Darussalam Blokagung

Siti Aimah, Nur Khalimah

Education Financing System Design, c) determination of nominal payments, d) recruitment of the system management team, e) determination of team responsibilities managers, f) coaching for managers, g) preparing payment system applications, h) making Darussalam SIS applications, i) online and offline system socialization, j) periodic system evaluation meetings, k) payment recap reports. 2) implications for education financing management through integrated sharia are: a) form a team to handle payment arrears, b) increase banking cooperation, c) seek to increase the productivity of manager performance, d) seek solutions to disruptions to banking transaction trouble systems, e) provide socialization and assistance to some guardians of students who are technologically illiterate (clueless).

Keywords: *Management, Education Financing, Integrated Syahriah*

A. PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber pembiayaan yang dapat menunjang efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan sumber daya yang berpotensi untuk menentukan keberhasilan dan kelancaran penyelenggaraan program pendidikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan administrasi Pendidikan. Dalam hal tersebut manajemen sangat diperlukan dalam pengelolaan pendidikan untuk menjadikan kegiatan yang diselenggarakan dapat berjalan dengan baik. Stoner dalam Mukhit (2017:10) juga menjelaskan bahwa manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Karena manajemen merupakan seni mencapai tujuan melalui usaha orang lain.

Hal di atas sesuai dengan pendapat Fattah dalam Jahari dan Syarbini (2013:73): “Biaya Pendidikan sebagai sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan Pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan kemampuan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, pengadaan perabot, pengadaan alat pelajaran, pengadaan buku-buku pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pembinaan pendidikan serta ketatausahaan”.

Biaya merupakan salah satu faktor yang terdapat dalam penyelenggaraan pendidikan. Menentukan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi. Karena jika suatu kegiatan tersebut dilakukan

dengan biaya yang rendah, akan tetapi menghasilkan kegiatan baik dan berkualitas, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara baik, efektif dan efisien. Mewujudkan lembaga pendidikan berkualitas yang juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghasilkan anak-anak handal memerlukan dukungan dan peran dari berbagai pihak baik dari kalangan masyarakat maupun dari pemerintah.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021, Standar Pendidikan Nasional terdiri dari atas 8 lingkup, yaitu: 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi lulusan, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, dan 8) standar penilaian pendidikan. Karena terselenggaranya organisasi dan Lembaga Pendidikan yang berkualitas serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencetak generasi yang cerdas, diperlukan dukungan dan peran penting dari berbagai pihak, baik dari masyarakat maupun pemerintah, khususnya dalam pembiayaan Pendidikan. Karena setiap jenis kegiatan apapun pasti membutuhkan yang namanya pembiayaan, dengan tanpa adanya biaya maka sebuah Pendidikan pasti tidak akan berjalan dengan semestinya.

Menurut Mulyono dalam Arwildayanto dkk (2017:50) bahwa biaya merupakan suatu unsur atau faktor yang dapat menentukan mekanisme penganggaran. Karena penetapan anggaran atau biaya mempengaruhi tingkat efektivitas dan operasi organisasi dalam mencapai tujuan. oleh karena itu disebut dengan pembiayaan atau pendanaan. Pembiayaan juga dapat disebut dengan *financing* yang merupakan sebuah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri melalui lembaga. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 8 yang mengatakan bahwa “masyarakat juga berhak atau ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”.

Istilah manajemen merupakan suatu proses mengatur, mengelola, melaksanakan serta merencanakan. Secara garis besar manajemen yang sebenarnya adalah cara menjalankan suatu organisasi atau bisnis sehingga aktivitas yang

dilakukannya dapat dikontrol atau dipantau dengan baik. Menurut Daft sebagaimana yang dikutip oleh Malayu (2004:54) bahwa manajemen merupakan sebuah seni standarisasi dalam penggunaan SDM (sumber daya manusia) secara efektif guna mencapai tujuan yang diinginkan melalui orang lain. Sedangkan menurut Harsey dan Blanchard dalam UPI (2011:86) menerangkan bahwa manajemen merupakan proses dimana sasaran yang akan dicapai organisasi itu melalui kepemimpinan. Sedangkan Siagian dalam Mukhit (2017:11) menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu kemampuan atau kreativitas untuk mencapai suatu yang diinginkan melalui kegiatan-kegiatan. menurut Daft sebagaimana yang dikutip oleh Malayu (2004:54) bahwa manajemen merupakan sebuah seni standarisasi dalam penggunaan SDM (sumber daya manusia) secara efektif guna mencapai tujuan yang diinginkan melalui orang lain. Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan berdasarkan ilmu melalui orang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan dan telah ditetapkan.

Manajemen pembiayaan sendiri memiliki arti sama dengan fungsi-fungsi dari manajemen, meliputi *planning, organizing, actuating, controlling*, adanya fungsi-fungsi tersebut pembiayaan pada pendidikan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, Adapun ruang lingkup manajemen pembiayaan pendidikan yang dijelaskan oleh tim dosen administrasi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dalam Jahari dan Syarbini (2013:76) bahwa ruang lingkup manajemen pembiayaan ada tiga : perencanaan keuangan (*Budgeting*), pelaksanaan (*Accounting*), dan tahap penilaian atau evaluasi (*Auditing*). Oleh karena itu, pengelolaan dana atau keuangan pendidikan merupakan suatu proses dari lembaga pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi jumlah dana yang dialokasikan untuk mendukung kebutuhan pendidikan.

Dalam konteks Pendidikan ada beberapa model pembiayaan Pendidikan yang digunakan. Menurut Mulyono dalam Jahari dan Syarbini (2013:79) menyatakan bahwa model pembiayaan Pendidikan ini didasarkan oleh pendapat para ahli. Adapun model-model tersebut adalah: 1) Model Flat Grant (*Flat Grant Models*)

yakni jenis pembiayaan ini disediakan oleh pemerintah secara merata dan menyeluruh, sedangkan defisitnya atau kekurangannya ditanggung oleh pemerintah daerah atau kota; 2) Model Landasan Perencanaan (*Foundation Plan Models*) yakni model pembayaran ini didasarkan pada penjaminan terhadap pengeluaran yang telah ditetapkan atau dianggarkan dan telah disusun oleh Lembaga Pendidikan; 3) Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (*Guaranteed Tax Based Plan Models*), yakni model pembayaran ini didasarkan pada alokasi pajak suatu negara; 4) Model Persamaan (*Equalization Models*) yakni model pembayaran ini lebih menekankan pada persamaan hak untuk mendapatkan biaya Pendidikan bagi sekolah. Oleh karena itu, model pembayaran seperti ini lebih mengalokasikan lebih banyak dana atau bantuan-bantuan bagi daerah yang ekonominya minim dibandingkan daerah yang ekonominya baik atau cukup; 5) Model Persamaan Persentase (*Percentage Equalizing*), yakni konsep model pembayaran ini mirip dengan model pembayaran yang mengalokasikan dananya kepada daerah yang ekonominya kurang atau lebih sulit, karena ini menjadi kekuatan bagi model pembayaran ini. Model ini juga memperhatikan dana yang dilihat dari jumlah siswa berdasarkan pada pelayanan yang diberikan terhadap mereka; 6) Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*) yakni model pembayaran ini lebih menekankan pada kemampuan atau keterampilan pada sekolah yang memiliki kesejahteraan tinggi untuk memberikan dana kepada negara, kemudian dari negara itu akan disalurkan kepada beberapa sekolah yang yang masih membutuhkan terutama dalam hal yang berhubungan dengan dana; 7) Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (*Full State Funding Models*) yakni pembayaran model ini sepenuhnya ditanggung oleh negara karena sebagai langkah menghindari perbedaan alokasi dana dari setiap daerah. Menurut Jones dalam Jahari dan Syarbini (2013:80) bahwa pembiayaan seperti ini harus mempertimbangkan beberapa asas penting yakni asas keadilan perlakuan terhadap siswa dan pembayar pajak serta control keuangan yang tidak akan menyebabkan problematika sosial.

Sumber pembiayaan merupakan unsur utama dalam suatu lembaga pendidikan menjadi berkualitas, lebih maju dan dapat menghasilkan output handal. Pembiayaan

Pendidikan melalui peserta didik menjadi potensi yang besar dalam menjalankan pendidikan dan menjadi modal utama keberlangsungan pendidikan. Allah SWT menjelaskan dalam al-Qur'an surat al-Mujadalah/58: 12-13 (Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia : 121) yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ فَعَلِيمُ الصَّلَاةِ وَآتُوا غُفُورٌ رَّحِيمٌ ءَأَسْفَقْتُمْ أَن تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الزُّكُوةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ خَيْرٌ لِّمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS.Al-Mujadalah:12-13)*

Dilihat dari ayat di atas dapat memberi gambaran kepada kita bahwa pendidikan itu tidak ada yang gratis, selalu membutuhkan biaya, dalam ayat ini Allah SWT juga memberi syarat bagi orang muslim yang ingin menimba ilmu pendidikan pada Nabi harus bershadaqah pada orang yang membutuhkan atau kurang mampu, shadaqah disini diasumsikan sebagai biaya pendidikan. Kendati demikian biaya pendidikan memberikan pengaruh serta peran yang baik, sehingga kegiatan yang berbentuk apapun khususnya kegiatan pendidikan pasti tidak lepas dari pembiayaan. Oleh karena itu pembiayaan pendidikan harus dikemas, dikelola, diatur serta diolah dengan baik melalui tahapan-tahapan dalam manajemen. Karena segala apapun bentuknya jika tidak diatur atau dimanajemenkan dengan baik maka dapat dipastikan kegiatan-kegiatan yang direncanakan atau telah dilaksanakan akan mengalami kegagalan yang berakibat fatal. Begitu juga yang telah dipaparkan dalam al-Qur'an Surat As-Sajdah ayat 5 (Kemenag) menyebutkan tentang manajemen yang berbunyi :

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: *“Dia yang mengendalikan urusan langit kebumi, lalu (ketentuan) tersebut dibawa kepadaNya dengan jangka waktu sehari yang ukurannya seribu tahun menurut perhitunganmu”.* (Q.S As-Sajdah:5)

Dilihat dari potongan ayat di atas bahwa begitu pentingnya sebuah manajemen, karena Allah SWT telah memberikan contoh bagaimana cara dalam mengendalikan makhluk-Nya. Oleh sebab itu kita sebagai makhluk-Nya harus mengikuti apa yang telah dicontohkan, apalagi pada lembaga pendidikan yang berkaitan dengan pembiayaan.

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan suatu proses mendapatkan, mengatur pengeluaran atau pemasukan seperti uang, barang, maupun jasa dengan menerapkan fungsi manajemen yaitu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Seperti yang dijelaskan oleh Terry dalam Rohman (2017:20) bahwa fungsi manajemen ada empat yaitu 1) *planning* atau yang disebut dengan fungsi perencanaan 2) *organizing* atau yang disebut fungsi pengorganisasian 3) *actuating* atau yang disebut fungsi pelaksanaan 4) *controlling* atau yang disebut fungsi pengendalian.

Manajemen pembiayaan dalam sebuah lembaga pendidikan yakni usaha pencarian finansial secara terstruktur dan maksimal, jujur dan bertanggungjawab secara objektif. Bila manajemen pembiayaan ini diterapkan pada sebuah lembaga pendidikan maka akan memberi pengaruh yang besar pada peningkatan kualitasnya. Kemudian standar pembiayaan pendidikan itu sendiri memiliki tiga hal yang harus diketahui yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik.

Diantara beberapa penelitian terkait dengan tema penelitian yang telah dilakukan oleh Fathurrohman (2019) yang fokusnya pada “Analisis pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan kinerja guru MTS al-Azhar Ponorogo”. Dengan hasil penelitian bahwa terkait perencanaan pembiayaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan guru dalam pembelajaran serta melaporkan laporan pertanggungjawabannya. Kemudian penelitian lain yang fokus penelitiannya pada “Pengaruh manajemen pembiayaan terhadap mutu Pendidikan di SMK Negeri 3 Palopo”, Nuracece (2021), dengan hasil penelitian bahwa terkait manajemen pembiayaan berpengaruh terhadap mutu pendidikan di SMK Negeri 3 Palopo. Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Yunus (2019) yang berfokus pada

“Implementasi manajemen pembiayaan terhadap peningkatan mutu sekolah di SD Negeri 1 Tonggalan Klaten Jawa Tengah”, dengan hasil penelitian bahwa implikasi manajemen pembiayaan pendidikan terhadap peningkatan mutu sekolah di SD Negeri 1 Tonggalan Klaten Jawa Tengah dapat dilihat dari pengalokasian dana untuk siswa berupa kegiatan ekstrakurikuler, pengalokasian untuk guru berupa peningkatan keprofesionalisan guru, pengalokasian terhadap sarpras berupa penambahan sarpras dan perbaikan sarpras yang ada.

Diantara beberapa penelitian diatas, peneliti ini memiliki unsur keterbaruan yaitu pada fokus penelitian pembiayaan pendidikan dan syahriah terpadu di Pesantren. Penelitian ini dilakukan di Pesantren Darussalam Blokagung yang terletak di Dusun Blokagung Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Pesantren ini didirikan oleh KH. Mukhtar Syafa’at Abdul Ghofur pada 15 Januari 1951. Mengingat banyaknya jumlah Lembaga Pendidikan yang ada di Pesantren mulai dari TK Darussalam, SD Darussalam, MTS Al-Amiriyah, SMP Darussalam, SPM Wustha, MA Al-Amiriyah, SMA Darussalam, SPM Ulya, IAI Darussalam, AKD, Ma’had Aly Darussalam dan Madrasah Diniyah Al-Amiriyah.

Pesantren Darussalam Blokagung terkait konsep pembiayaan pendidikan sepakat menetapkan sistem pembiayaan “syahriah” terpadu sejak tahun 2019. Pembiayaan pada sistem ini dikelola langsung oleh Pesantren Darussalam Blokagung. Metode pembiayaan syahriah itu sendiri adalah pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, transparansi, transaksi yang bertanggung jawab dan jujur.

Dengan diadakannya sistem pembayaran terpadu memudahkan berbagai pihak khususnya wali santri. Mengingat banyaknya santri (saat ini mencapai 6000) yang pembayarannya awalnya masih menggunakan sistem manual membuat kewalahan petugas (terbebani) dalam menanganinya. Sistem terpadu atau integrasi ini selain memudahkan wali santri dalam hal pembayaran, karena seluruh pembayaran mulai dari Sumbangan Pokok Pendidikan (SPP), kos makan, ekstra kurikuler serta pembayaran yang lain digabung menjadi satu dan bisa dibayarkan melalui Bank BRI, BNI dan BSI. Selain untuk menanggulangi kecurangan dalam hal jumlah biaya pembayaran yang kadang terjadi.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa manajemen pembiayaan pendidikan di Pesantren Darussalam Blokagung mengalami perubahan. Berawal dari pembayaran dengan sistem manual hingga menggunakan pembayaran terpadu yang berbasis perbankan. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik meneliti tema ini, karena transformasi sistem pembayaran tersebut berkontribusi pada akuntabilitas keuangan pesantren. Adapun fokus penelitian ini adalah : 1) Bagaimana implementasi manajemen pembiayaan pendidikan melalui syahriah terpadu di Pesantren Darussalam Blokagung?; 2) Bagaimana implikasi manajemen pembiayaan pendidikan melalui syahriah terpadu di Pesantren Darussalam Blokagung?

B. METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi partisipan dan dokumentasi. Lokasi/obyek penelitian berada di Pesantren Darussalam Blokagung, karena terdapat kondisi faktual terkait manajemen pembiayaan pendidikan terpadu dengan nama syahriah terpadu yang saat ini sudah berbasis perbankan. Waktu penelitian dimulai bulan September 2022 sampai Juni 2023.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu: sumber data primer diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi partisipan, yakni keterlibatan langsung peneliti di lokasi penelitian dalam proses kegiatan syahriah terpadu. Selain itu juga menggunakan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi atau arsip serta laporan kegiatan implementasi dan implikasi syahriah terpadu di Pesantren Darussalam Blokagung.

Informan utama yakni Bapak Mohammad Muzzaki yang bertugas menangani pembiayaan di Pesantren Darussalam. Selain itu peneliti diarahkan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan data dan informasi yang mendukung data penelitian ini, yakni Bapak Andi Kriswanto sebagai Sekertaris Kasir Biro Keuangan dan Bapak Fadholi sebagai operator pusat atau admin pusat. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis

interaktif tiga model yang memuat reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Syahriah Terpadu Di Pesantren Darussalam Blokagung

a. Musyawarah Pengurus Yayasan Dan Pengelola

Penetapan konsep pembiayaan pendidikan Pengurus Yayasan Pesantren Darussalam Blokagung mengadakan rapat yang dihadiri oleh team pengendali mutu, kepala sekolah, kepala madrasah, kepala pesantren, biro keuangan, kabid keuangan dll dari seluruh elemen yang saling berkaitan. Dari situlah muncul ide dari pengurus yayasan terkait kebijakan berupa sistem pembiayaan pendidikan tersebut, membuat rancangan sistem pembiayaan pendidikan sehingga menjadi penetapan pembiayaan pendidikan yang sedemikian. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Jones yang dikutip oleh Mulyasa (2007:49) bahwa *financial planning is called budgeting* merupakan koordinasi sumber daya yang ada guna mencapai sasaran yang ditetapkan menimbulkan efek negative.

b. Perancangan Sistem Pembiayaan Pendidikan

Setelah terlaksananya rapat yang diadakan oleh pengurus Yayasan Pesantren Darussalam Blokagung dengan pengelola sistem. Dalam pembentukan sistem ini melibatkan pengurus yayasan, kepala sekolah, kepala madrasah, kepala pesantren, yang hasilnya terbentuklah proses team pengelola yang berkoordinasi dengan unit-unit, jadi tidak langsung ditetapkan oleh pihak yayasan langsung, karena nominal tiap pertingkatan atau unit itu berbeda-beda. Jadi nantinya mereka akan musyawarah sendiri dengan unit masing-masing lalu dilaporkan kepada pengelola keuangan yang nantinya akan diberikan kepada pengelola sistem. Hal ini sesuai dengan Fattah (2012:23) bahwa biaya

pendidikan merupakan unsur dalam mekanisme penganggaran, karena biaya memengaruhi suatu organisasi mencapai tujuan-tujuan pendidikan.

c. Penetapan Nominal Pembiayaan

Dalam proses pendataan dan kalkulasi jumlah keuangan pembiayaan pendidikan sebelum ditetapkan oleh pihak atasan atau yayasan maka setiap unit-unit akan melakukan rapat atau musyawarah terkait kebutuhan biaya guna berjalannya pendidikan, seperti halnya kebutuhan mulai dari buku LKS, praktek-praktek, Ujian atau evaluasi, PKL, diklat, seminar serta kegiatan-kegiatan yang lainnya. Setelah hasil rapat sudah didapatkan maka dari setiap unit akan melaporkan kepada pihak pengelola keuangan lalu dirapatkan bersama dengan tim pengendali mutu, kepala sekolah, kepala madrasah, biro keuangan dan kbid yang berkaitan. Sehingga dari rapat tersebut akan muncul penetapan pembiayaan pendidikan dari setiap lembaga atau unit-unit dari tiap-tiap santri.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Fattah (2012:47) bahwa penganggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Oleh karena itu dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga.

d. Perekrutan Tim Pengelola System

Mengenai penanggung jawab sistem, pihak Yayasan Pesantren Darussalam Blokagung tidak merekrut team pengelola atau penanggung jawab lagi, namun mereka memanfaatkan petugas biro keuangan yang dibentuk sebelumnya dan hanya ditambahi tupoksi atau job descriptionnya saja.

e. Penetapan Tanggung Jawab Tim Pengelola

Dalam penetapan tim pengelola keuangan ada beberapa divisi, untuk divisi tertinggi yakni ada yang namanya admin atau operator pusat, hal ini

dipegang oleh bapak Nurudin dan bapak Fadoli yang nanti tugasnya adalah terkait dengan pengoperasian sistem, merubah sistem, memperbaiki sistem dan lain-lain. Adapun dibawah operator pusat ada juga koordinator yang membantu mengawasi keuangan dan mengatasi ketika ada trobel pada setiap unit, baik itu Madrasah diniyah, Smp/ sederajat, sma/ sederajat, pondok pesantren hingga perguruan tinggi. Selain operator pusat ada juga operator unit yang bertanggung jawab atas pemvalidan data pembayaran yang nantinya akan disampaikan kepada seluruh wali kelas untuk dishare atau dibagikan yang tujuannya untuk mengingatkan siapa saja anak didiknya yang belum membayar. Dan wali kelas akan menampung jika ada kendala bahwa anak didiknya mengalami keterlambatan dalam hal melakukan pembayaran. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Gordon dalam Mustari (2014:02) bahwa manajemen merupakan suatu metode yang digunakan oleh administrator guna melakukan proses atau tugas-tugas tertentu atau sebuah tujuan tertentu.

f. Pembinaan Terhadap Pengelola

Pengelola sistem pembiayaan melakukan sebuah evaluasi atau monitoring setiap satu bulan sekali, namun dalam evaluasi ini hanya dilakukan oleh pihak keuangan saja dari perwakilan pengurus yayasan biasanya hanya admin pusat saja yang nantinya akan menyampaikan kebawahannya. Proses evaluasi ini dilakukan guna membicarakan terkait kendala-kendala yang dihadapi saat pelayanan dan pembri-fiengan atau pembinaan kepada sumber daya yang masih belum faham terkait pengoperasian dan dalam hal melayani konsumen. Hal ini senada dengan Mustari (2014:11) bahwa pembinaan merupakan serangkaian upaya pengendalian secara professional oleh semua unsur organisasi agar berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

g. Menyiapkan Aplikasi Sistem Pembayaran

Tahapan strategi pelaksanaan sistem pembiayaan pendidikan yaitu menyiapkan sebuah sistem pembiayaan pendidikan berupa aplikasi, yakni sebagai alat pelayanan pengoperasian namun dalam hal ini pengurus yayasan hanya memperbarui serta menambahi fitur-fitur dari sistem yang digunakan sebelumnya. Jadi Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung sudah memiliki sistem keuangan yang termasuk dalam database, namun masih belum ada jalinan kerja sama dengan perbankan, pada tahun 2018 yayasan baru saja menjalin kerja sama dengan perbankan.

h. Membuat Aplikasi SIS Darussalam

Demi mendukung keefektifan sistem pembiayaan pendidikan pengurus yayasan pesantren Darussalam menciptakan aplikasi yang diberi nama SIS (sistem informasi santri) Darussalam yang mana aplikasi ini berguna untuk mengecek pembayaran santri yang dilakukan secara online, sehingga aplikasi ini mempermudah wali santri dalam mengupdate data pembayaran anaknya. Berikut ini adalah gambar aplikasi SIS.



Gambar 1 Aplikasi SIS Darussalam
 Sumber : Dokumen Peneliti Unduh *Play Store*

Dalam dokumentasi gambar tersebut dapat dilihat bahwa aplikasi tersebut merupakan kerja keras pengurus yayasan bagian pengelola keuangan dalam menciptakan keefektifan program perubahan sistem pembiayaan pendidikan santri agar wali santri mengetahui data pembayaran anaknya, dengan menginstal aplikasi tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan

oleh Mustari (2014:168) bahwa fungsi manajemen memiliki makna yang luas yakni menyediakan informasi secara kuantitatif yang bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan sesuai dengan kepentingan masing-masing.

i. Sosialisasi Sistem Online Dan Offline

Dalam penerapannya, ketika mengimplementasikan sistem pembiayaan pendidikan yaitu melalui sosialisasi yang dilakukan atau dilaksanakan melalui brosur-brosur yang disebarakan ketika mau liburan, haul dan sebagainya, dilanjut ketika proses KBM sudah dimulai. Dalam hal ini pengurus yayasan berkordinasi dengan semua wali kelas guna untuk menyalurkan informasi ini kepada walisantri. Menurut Priansa dan Granida sistem merupakan kumpulan komponen atau sub sistem yang bekerja sama dan berhubungan satu sama lain secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu.

j. Rapat Evaluasi Sistem Secara Periodik

Evaluasi sistem ini dilakukan oleh pengurus yayasan secara terus-menerus dan setiap saat, dalam proses evaluasi ini bukan hanya tentang pemberian motivasi maupun pengawasan melainkan juga dilakukan pendampingan disetiap tugas yang dilakukan oleh pengelola sistem, dengan tujuan supaya tidak terjadi kesalahan fahaman, kelancaran pelayanan pembayaran, sampai pengelola sistem tersebut mengerti tentang bagaimana pengoperasian sistem.

k. Laporan Rekap Pembayaran Rutin Dan Berkala

Strategi selanjutnya guna untuk mengevaluasi sebuah sistem pembiayaan pendidikan maka pengurus yayasan memberikan tugas kepada operator pusat yang berkordinasi dengan operator unit untuk melaporkan rekapan jumlah pembayaran setiap sepuluh hari sekali yang mana hal ini dilaporkan kepada kabid keuangan kemudian dishare atau diinfokan kepada seluruh walikelas guna untuk dikonformasikan kepada walisantri terkait pembayaran yang belum tuntas.

I. Implikasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Syahriah Terpadu Di Pesantren Darussalam Blokagung

1) Membentuk tim penanganan tunggakan pembayaran

Untuk memaksimalkan sebuah target sistem pembiayaan pendidikan, pihak Yayasan Pondok Pesantren Darussalam membentuk tim penanganan santri yang menunggak dalam hal pembayaran. Melihat dari jumlah rekapan pembayaran santri yang kurang maksimal atau masih belum terbayarkan, dalam menangani kasus seperti ini pihak yayasan menjalin kerja sama dengan seluruh wali kelas guna menangani tunggakan santri, nantinya wali kelas akan mendapat informasi dari pengurus yayasan pondok kemudian wali kelas akan menginformasikannya kepada wali santri serta mengonfirmasi dan menanyakan perihal pembayaran yang belum dibayarkan.

2) Menambah jalinan kerja sama dengan perbankan

Awal mula perencanaan atau perancangan sistem ini pengelola keuangan yayasan bekerja sama dengan stake holder yang berada dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam guna mensukseskan atau melancarkan sistem ini, tidak hanya monoton di yayasan, penerapan sistem ini mendapat support dari perbankan ada bank BNI, BRI, BSM. Awal mula bank yang mensupport atau yang bekerja sama dalam sistem ini adalah bank BSM yakni pada tahun 2018, untuk meningkatkan keefektifan maka pada tahun 2019 Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung menjalin kerja sama dengan bank BRI, serta pada tahun 2020 Yayasan Pondok Pesantren bekerja sama dengan bank BNI. Mustari (2019:163) menjelaskan bahwa manajemen keuangan merupakan suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi.

3) Menciptakan aplikasi sistem pembiayaan pendidikan

Demi menjalankan keefektifan dan keefesiensi sebuah kebijakan, pihak pengurus Yayasan Pesantren Darussalam Blokagung menciptakan

sebuah aplikasi yakni aplikasi SIS Darussalam yang berguna untuk membantu seluruh elemen yang terkait perihal pengecekan pembayaran santri yang dilakukan secara online, senada yang diungkapkan oleh Mustari (2014:168) fungsi manajemen keuangan memiliki arti yang meluas yakni menyediakan informasi secara kuantitatif yang dapat dijadikan dasar pertimbangan agar tidak terjadi penyelewengan.

4) Produktivitas kinerja pengelola

Guna mendukung keefektifan sistem pembiayaan pendidikan, maka pihak pengurus Yayasan Pesantren Darussalam Blokagung sangat memperhatikan keproduktifan kinerja pegawai pengelola keuangan yang selalu berkoordinasi dengan kepala asrama, yang jadinya kepala asrama turut serta memantau pembayaran setiap santri setiap bulannya. Selain berkoordinasi dengan kepala asrama pengelola keuangan juga berkoordinasi dengan seluruh wali kelas terkait penanganan santri yang masih memiliki tanggungan atau tunggakan yang mana nantinya wali santri akan mengonfirmasi atau menanyakan kepada wali santrinya. Sesuai dengan Undang-undang No 20 Tahun 2013 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

5) Terkadang Sistem Terhambat Trouble Perbankan

Ketika sistem ini sudah mulai berjalan, tentunya ada faktor yang menghambat proses yakni berupa kendala pada software, karena pihak Yayasan Pesantren Darussalam Blokagung bekerja sama dengan pihak perbankan sehingga ketika ada perbaikan sistem maka akan terjadi trouble, hal semacam inilah yang menjadi penghambat keefektifan pada sistem, hal ini sesuai dengan pendapat Garner dalam Ismaya (2019:138) menjelaskan bahwa efektifitas tidak berhenti pada tujuan yang dicapai melainkan pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga, *effectiveness* “*characterized by qualitative outcomes*” efektivitas lebih menekankan pada kualitas outcomes.

6) Sebagian Wali Santri Gagap Teknologi (Gaptek)

Sebagian wali santri Pondok Pesantren Darussalam yang bermukim di luar Jawa dan pelosok atau jauh dari perkotaan yang pastinya juga jauh dengan bank, ada yang belum paham tentang smartphone atau android, sehingga mereka harus keluar desa atau jauh-jauh untuk mencari bank, dan sebagian mereka juga harus meminta tolong untuk membantu akses fitur yang ada di smartphone, hal inilah yang menjadi kendala dalam penerapan sistem ini dan menjadi dasar adanya sosialisasi maupun pendampingan pada wali santri khususnya.

D. KESIMPULAN

1. Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan melalui syahriah terpadu di pesantren Darussalam Blokagung dimulai dengan menggelar musyawarah pengurus yayasan dan pengelola sistem, dilanjutkan dengan pembentukan sistem pembiayaan, lalu perumusan dan penetapan nominal pembiayaan, penetapan tim pengelola, monitoring pengelolaan serta evaluasi program, menyiapkan dan upgrade aplikasi pembayaran, membuat dan terus melakukan inovasi aplikasi Sistem Informasi Santri (SIS) Darussalam, kemudian juga dengan melakukan sosialisasi sistem sebelum penerapan.
2. Implikasi manajemen pembiayaan pendidikan melalui syahriah terpadu di Pesantren Darussalam Blokagung dengan membentuk tim penanganan tunggakan pembayaran serta menambah jalinan kerja sama dengan perbankan, meningkatkan produktivitas kinerja pengelola juga mengevaluasi kurangnya fasilitas dan memberikan sosialisasi maupun pendampingan atas minimnya penguasaan teknologi oleh pengguna jasa.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Akdon, dkk. (2015). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Arifudin, Opan dkk. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Widina Bhakti Persada
- Arikunto, Suharsini. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung: Rineka Cipta
- Arwildiyanto, dkk. (2017). *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*. Gorontalo. IKAPI JABAR.
- Fattah, Nanang. (2012). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Hasibuan, Malayu S.P. (2004). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta. Bumi Aksara
- Hidayat dan Wijaya. (2017). *Ayat-Ayat Al-Quran tentang Manajemen Pendidikan Islam*. Medan. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI)
- Mustari, Mohamad. (2014). *Manajemen Pendidikan*. Depok. PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Panuntun dan Kuncoro. (2019). *Sistem Informasi Pembayaran Sekolah Dengan Memanfaatkan Teknologi Barcode Berbasis Multiuser Di SMP Muhammadiyah 3 Semarang*. Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi. Vol.12 No.2. Halaman 11
- Priansa dan Garnida. (2019). *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, Dan Profesional*. Bandung. Alfabet
- Puurwanto, Agus dkk. (2021). *Sistem Informasi Pembayaran Syahriah Pondok Pesantren Daarul Qur'an Ammr Tlogosari Kulon Semarang Berbasis Web Dan Notifikasi Email*. Journal of information system and computer
- Roji, dkk. (2020). *Buku Ajar Konsep Pembiayaan Pendidikan Islam*. Sidoarjo. UMSIDA Press.
- Saefullah. (2014). *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung. Pustaka Setia
- Sewang, Anwar. (2015). *Manajemen Pendidikan*. Malang: Wineka Media

- Sidiq, Umar. (2018). Manajemen Madrasah. Yogyakarta: Nata Karya
- Syarbini dan Jahari. (2013). Manajemen Madrasah Teori, Strategi Dan Implementasi. Bandung. Alfabeta
- Tampubolon. (2015). Perencanaan Dan Keuangan Pendidikan. Jakarta. Mitra Wacana Media
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. (2011). Manajemen Pendidikan. Bandung:Alfabeta